

Sukoharjo Buka 'Jamu Kuat'



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani foto bersama sejumlah pimpinan OPD dan instansi usai penandatanganan nota kesepakatan terkait 'Jamu Kuat'.

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo belum lama ini melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui Aplikasi Jamu Kuat atau kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Nota Kesepakatan, bahwa yang maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.

Tujuan pembentukan aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat) untuk menjalin sinergi para pihak dalam percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Ini merupakan aplikasi sharing data dengan beberapa perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo, yang bertujuan untuk mensinergikan layanan hukum dan masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan *good governance* dalam memberikan percepatan layanan keadilan bagi masyarakat," tandas Etik Suryani.

Di samping penandatanganan nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Polres Sukoharjo, Kantor Kementerian Agama, Kantor ATR/BPN dan PT, POS Kabupaten Sukoharjo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.

"Program Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah," jelas bupati. (Mam)

BELUM ADA SAPI DIPASANGI BARCODE Temanggung Gencar Vaksinasi PMK

TEMANGGUNG (KR) - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung terus menggenarkan vaksinasi ternak untuk mencegah penularan penyakit kuku dan mulut (PMK). Vaksinasi tidak hanya di kandang komunal tetapi juga di kandang perseorangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto mengatakan vaksinasi PMK terus digenarkan di Kabupaten Temanggung. Saat ini telah ada vaksinasi kedua, selain vaksinasi kesatu tetap dilayani. "Petugas melakukan vaksinasi PMK ternak sapi dari kandang ke kandang untuk mence-

gah penularan PMK di Temanggung meluas," jelasnya, Senin (19/9).

Menurutnya, vaksinasi PMK dilakukan di wilayah yang belum ada kasus PMK. Zonasi awal adalah kecamatan, lantas diciutkan menjadi desa, sebab jika mengacu pada kecamatan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, semua sudah ada kasus PMK.

"Kami ciutkan zonasi vaksinasi PMK di tingkat desa sehingga dapat mencakup ternak lebih banyak dan pencegahan lebih tepat sasaran," ungkap Joko Budi Nuryanto.

Dia mengatakan, catatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, sam-

pai 6 September 2022 sudah ada 3.011 ternak ternak sapi yang mendapat vaksin 1. Dari jumlah tersebut, ternak yang telah mendapat vaksinasi kedua sebanyak 874, sehingga total telah ada 3.885 dosis vaksin PMK yang disuntikkan.

Diaku, pihaknya belum memasang barcode pada ternak sapi yang telah mendapat vaksinasi dua kali. Meski belum ada yang dipasang barcode, pihaknya telah mengeluarkan surat keterangan ternak yang telah divaksin dua kali.

Kasus PMK sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu lalu, tetapi kini telah turun. Petugas di lapangan memberi sosialisasi terkait pen-

cegahan penularan PMK, dan pengobatan ternak yang terpapar PMK.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, Badrun Mutofa menyatakan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk penanganan dan pencegahan PMK. Di

antaranya kesadaran dari peternak tentang perlunya vaksinasi pada ternak. "DPRD dalam berbagai kesempatan juga ikut menyampaikan perlunya vaksinasi PMK, sebab jika terkena PMK bisa merugikan peternak itu sendiri," tandasnya. (Osy)



KR-Zaini Arrosyid

Vaksinasi PMK di Kabupaten Temanggung.

PERLU KOORDINASI ANTARDAERAH Penyaluran BLT BBM Rawan 'Bentrok'

KARANGANYAR (KR) - Penyaluran BLT BBM bersumber APBD Kabupaten Karanganyar perlu dikoordinasi dengan kabupaten/kota sekitarnya agar tidak 'bentrok' dengan kabupaten/kota sekitarnya. Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan terdapat tiga OPD yang ditugasi menyalurkan BLT BBM bersumber APBD perubahan 2022.

"Penyalurannya didasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Penjabarannya, Pemerintah Daerah ditugaskan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum," jelas Bagus Selo, Sewnin (19/9).

Tiga OPD yang menyalurkan BLT BBM untuk antisipasi inflasi itu, terdiri Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Sosial (Dinsos). Disebutkan, Dishub yang mengampu sasaran dari penggunaan BBM subsidi, seperti awak angkutan umum, ojol dan ojek pengkolan, harus cermat karena mereka belum tentu ber-KTP Karanganyar.

"Sebaliknya, penduduk Kabupaten Karanganyar ada juga yang beroperasi di luar Karanganyar, seperti Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Klaten dan Wonogiri," kata Bagus Selo.

Bagus juga khawatir terjadi tumpang-tindih penyaluran sehingga perlu dilakukan koordinasi antarpemda di wilayah Sura-

karta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subsukowonosraten). Regulasi PMK Nomor 134 juga berlaku untuk keuangan Pemprov.

"Koordinasi juga perlu dijalin Pemprov Jawa Tengah agar penyalurannya tidak 'bentrok' dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penggunaan NIK sangat membantu agar tidak overlapping," tandasnya.

Bagus memastikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 tidak mengganggu anggaran rutin. Menurutnya, anggaran yang sudah dipersiapkan 2 persen dari APBD tidak mengganggu kegiatan lain.

Ia menyarankan OPD segera menyelesaikan persiapan penya-

luran. Penyaluran BLT BBM juga tidak perlu menunggu semua bantuan pusat selesai dibagikan. "Karena program dan sarannya spesifik. Jadi, tidak perlu khawatir dibagikan bareng bansos pusat," katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Mauloto mengatakan, Bupati Juliyatmono memilih pembagian BLT BBM bersumber APBD dibagikan setelah semua bantuan pusat selesai dibagikan. Tujuannya agar mereka yang luput mendapat bantuan pusat dapat diberi dari bantuan APBD.

"Pak Bupati minta setelah semua anggaran pusat turun dan dievaluasi, baru dari APBD dibagikan. Sifatnya BLT Sapu Jagad," ungkapnya. (Lim)

HUKUM

Pekerja Bangunan Cabuli Anak SD



KR-Istimewa

Tersangka WAR didampingi penasihat hukum menjalani pemeriksaan.

BANYUMAS (KR) - Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas, menangkap WAR (59) warga Kecamatan Kedungbanteng Banyumas yang berprofesi sebagai pekerja bangunan.

Lelaki itu diduga melakukan pencabulan terhadap GLG (10), ADL (10) dan AZL (10) yang meru-

pakkan siswa salah satu SD di Purwokerto.

"Tersangka WAR merupakan pekerja bangunan yang sedang bekerja di SD tempat para korban bersekolah," jelas Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi, Senin (19/9).

Perbuatan bejad pelaku, berawal pada Selasa (13/9) sekira pukul 10.00,

saat jam istirahat ketika korban ADL sedang berdiri di depan kelas, tiba-tiba melintas di depan tersangka yang saat itu sedang memanggul pasir.

Selanjutnya, tersangka WAR dengan menggunakan tangan kanan memegang sambil berjalan (mencolek) alat kelamin dan pantat korban sehingga korban kaget dan terdiam.

Korban selanjutnya menngadu kepada guru mereka bahwa saat istirahat alat kelaminya dipegang oleh tersangka. Ternyata kejadian serupa juga dialami siswi lainnya.

Mendengar pengakuan para siswinya tersebut, kemudian pihak sekolah melaporkannya ke Polresta Banyumas. Saat diamankan dan dilakukan interogasi awal, tersangka mengakui perbuatannya. (Dri)

DUGAAN KORUPSI DI PEGADAIAN BROSOT Berkas Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

WATES (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pemberian kredit di Pegadaian UPC Brosot yang dilakukan tersangka Y (50) warga Yogya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (19/9). Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 4,9 miliar.

Kepala Kejari Kulonprogo Ardi Suryanto SH MH didampingi Kasi Pidsus Aulia Hafidz SH MH, mengatakan pihaknya telah selesai melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit di Pegadaian UPC Brosot yang dilakukan tersangka selama dua tahun, dari tahun 2019 hingga awal 2022.

"Hari ini berkas perkara dugaan korupsi dengan tersangka Y yang menjadi pimpinan di Pegadaian UPC Brosot diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),

setelah perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Termasuk administrasi dan surat dakwaannya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta," jelasnya.

Adapun indikasi kerugian dari Pegadaian setelah dilakukan audit oleh petugas sekitar Rp 4,9 miliar. Tersangka merekayasa barang agunan sebanyak 877 perhiasan beserta nama-nama yang menggadaikan atau menggunakan kembali nama orang-orang yang pernah melakukan kredit di tempat tersebut untuk menyalipkan dalam pemberian jaminan barang.

"Saat pencairan bukti normatif ada semua, namun tersangka menerima sendiri uangnya Tersangka melakukan korupsi hanya seorang diri karena tugasnya merangkap dan mengakui hasilnya dinikmati sendiri untuk operasional pribadi," terangnya. (Dan)

KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BUMDES BERJO Sakit, Tersangka Mangkir Panggilan Kejari

KARANGANYAR (KR) - Beralasan sakit, Kades Berjo Nargoyoso, Suyatno, mangkir dari panggilan kejaksaan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana BUMDes.

Kasi pidsus Kejari Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah, Selasa (20/9), mengatakan surat keterangan sakit dari dokter diantar penasihat hukum tersangka. Di dalamnya menerangkan bahwa kondisi kesehatan Suyatno tak memungkinkan menghadiri pemanggilan penyidik.

"Penasihan hukumnya membawa surat keterangan sakit dari dokter. Tersangka tidak bisa datang memenuhi pemanggilan," jelasnya.

Terakhir mangkirnya tersangka untuk memenuhi panggilan kejaksaan itu bukan untuk pertama kalinya. Saat masih berstatus saksi, Kades

Berjo ini mangkir sampai tiga kali saat dipanggil dengan alasan kesibukan kerja.

Kasusnya dugaan korupsi dana BUMDes Berjo dengan nilai kerugian negara Rp 1,126 miliar. Tersangka diduga menyelewengkan dana pengembangan obyek wisata Telaga Madirda pada 2020.

Agenda pemanggilan berupa memenuhi kebutuhan pemeriksaan tersangka. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga menetapkan mantan Dirut BUMDes Berjo Eko Kamsono sebagai tersangka.

Beda dengan Suyatno, tersangka Eko Kamsono menghadiri pemang-

Oknum Karyawan 'Grogoti' Tempat Kerja

SLEMAN (KR) - Diduga merasa kecewa dengan perlakuan majikan, seorang pria berinisial PR (33) nekat melakukan tindak pidana. Karyawan asal Jakarta itu mencuri di tempatnya bekerja, ahilasi ia kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Ngaglik.

Kapolsek Ngaglik, Kompol Anjar Istriani didampingi Kanit Reskrim Iptu Agus Setyo Wahyudi, Selasa (20/9), mengatakan peristiwa terjadi di sebuah toko di wilayah Ngaglik Sleman, Rabu (14/9). Pencurian di tempat Aditya itu, diketahui saat salah satu karyawan yang masuk shift pagi, hendak memakai HP.

Namun rupanya, HP warna grey yang biasanya digunakan untuk operasional toko itu, sudah tidak ada. Karyawan tersebut, kemudian mencari PR di kosnya, karena lelaki itulah yang piket atau jatah masuk pada malam harinya.

"Kedatangan saksi ke kos pelaku, untuk menanyakan keberadaan HP bengkel, karena malam hari pelaku yang masuk kerja. Namun saat dicari, ternyata karyawan yang masuk pada malam harinya itu tidak ada di kos," ungkap Kapolsek.

Saksi lantas kembali ke TKP dan ternyata sejumlah barang di tem-

patnya bekerja juga sudah tidak ada. Mendapati kenyataan itu, saksi lantas memberitahu pemiliknya, kemudian mereka melapor ke Mapolsek Ngaglik.

Petugas yang mendapatkan adanya laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta mempelajari CCTV. Saat diinventarisir, selain HP, barang yang hilang yaitu 7 buah liquid rokok elektrik, 2 buah Catridge dan 8 buah POD rokok elektrik.

Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas dapat mengidentifikasi pelaku pencurian. Keberadaan pelaku dicari dan saat mendapatkan informasi jika PR sedang pulang ke kosnya di Sariharjo Ngaglik Sleman, polisi tak mau hilang buruan.

PR akhirnya berhasil diamankan dan tak bisa berkelit setelah polisi menemukan barang curian yang belum sempat dijualnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP ancaman pidana di atas 4 tahun.

Aksi nekat juga dilakukan LV (25) asal Sumatera Utara, yang kini mendekam di tahanan akibat ulahnya. Butuh biaya untuk wisuda, ia

melakukan pencurian di rumah makan tempat dulu LV pernah bekerja. Kani menjelaskan, pencurian berawal saat pelaku datang ke rumah makan mengendarai sepeda motor Honda Vario, Sabtu (3/9) malam.

Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian mengambil uang di rumah makan yang berlokasi di Sariharjo Ngaglik Sleman itu.

Akibat kejadian tersebut, pemilik warung yakni Aji (25) kehilangan uang, Rp 2,3 juta di kotak tempat penyimpanan uang tunai. Setelah kejadian itu, korban melapor ke Polsek Ngaglik untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

"Pelaku kami tangkap saat berada di kos temannya di Kalasan Sleman dengan barang bukti berupa sepeda motor, HP, celana, kaos, sandal dan kotak penyimpanan uang," tandasnya.

Ternyata pelaku tidak hanya satu kali melakukan aksinya tapi sudah pernah mencuri dan ketahuan, namun diselesaikan secara kekeluargaan.

"Uang hasil curian, menurut keterangan pelaku, sudah habis untuk biaya wisuda karena malam melakukan pencurian, paginya wisuda," pungkas Agus. (Ayu)